

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan tujuan atas sasaran perusahaan (Menteri Keuangan RI berdasarkan Keputusan No. 740/KMK. 00/1989 tanggal 28 Juni 1989). Suatu kinerja perusahaan dapat dinilai dan diukur. Pengukuran kinerja perusahaan adalah sebuah tolak ukur atau bagi manajemen perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan, apakah kinerja perusahaan sudah baik dari aspek keuangan dan non keuangan. Peningkatan kinerja perusahaan dapat dicapai melalui perencanaan manajemen strategik yang tepat. Pengukuran kinerja perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan saat ini, sehingga memudahkan para penentu keputusan dalam merencanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Perlu dilakukannya pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan, sehingga perusahaan dapat menetapkan strategi yang lebih tepat agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik pada aspek keuangan maupun aspek non keuangan. Menurut Kasmir (2008:273), kinerja perbankan merupakan keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja buruk bukan tidak mungkin para direksi akan diganti.

Kinerja perbankan yang baik mengindikasikan bank yang bersangkutan sehat. Tingkat kesehatan, termasuk tingkat efisiensi perbankan dapat diukur juga dinilai dari dua perspektif yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Aspek keuangan dan non-keuangan dinilai dengan menggunakan berbagai indikator. Sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan tahunan dari bank yang bersangkutan. Pada aspek keuangan baik maupun buruknya kinerja keuangan perbankan, berhasil atau tidaknya mencapai kinerja bisnis secara memuaskan dapat diukur dengan tolak ukur keuangan yang disebut dengan rasio keuangan.

Terdapat beberapa cara menganalisis aspek keuangan suatu kinerja perusahaan dalam laporan keuangan perbankan. Menurut Taswan (2010:201), Analisis bank secara eksplisit direpresentasikan oleh rasio-rasio. Terdapat beberapa cara menganalisis kinerja keuangan dalam laporan keuangan yang disebut dengan analisis rasio keuangan. Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur melalui beberapa rasio yaitu *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Non-Performing Loan* (NPL), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasi Dibanding Dengan Pendapatan Operasi (BOPO), LDR, *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya juga harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka Panjang (Nor, 2011). Aspek non keuangan yang digunakan penelitian ini untuk menunjukkan suatu kinerja perusahaan yang baik pada penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility*. CSR merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberlanjutan hidup perusahaan (Lanis and Richardson, 2012).

Bisnis dilahirkan untuk menghasilkan laba. Pemilik ingin kinerja keuangan dan nilai perusahaan mereka baik sehingga dapat menunjukkan suatu kinerja perusahaan yang meningkat dan berhasil. Namun, dalam beberapa kasus, tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut didelegasikan kepada manajemen. Dengan pemisahan antara kontrol dan kepemilikan dalam pengaturan perusahaan, masalah agensi dapat muncul. Misalnya, penghindaran pajak perusahaan, strategi perusahaan yang signifikan mungkin disalahgunakan oleh manajer terutama mereka yang ditugaskan untuk meminimalkan konsekuensi pajak dari transaksi perusahaan karena mereka manfaat sendiri (Chen *et al.*, 2014)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, pajak diketahui sebagai sebuah kontribusi yang wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun sebuah badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi masih didasari dengan undang - undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut menjadi suatu fenomena yang sangat penting karena dapat menjadi fokus pemerintah untuk pengelolaan pendanaan negara yang baik. Pajak menjadi salah satu sumber dana dan pendapatan negara, pemerintah berupaya agar peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat dan terhindar dari segala kecurangan ataupun hal yang tidak diinginkan. Fenomena pajak yang ditemui yaitu banyak cara yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan untuk menghindari pajak secara dengan masih mematuhi hukum dan melanggar hukum. Pada sisi pajak perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk

memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010).

Terdapat suatu fenomena yaitu beberapa perusahaan saat ini banyak yang terbukti melakukan praktik penghindaran pajak, misalnya adalah BCA. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus pajak PT. Bank Central Asia (BCA). Hadi diduga menyalahgunakan wewenang saat menduduki jabatan sebagai Direktur Jendral Pajak pada tahun 2001-2006. Hadi menerima permohonan keberatan pajak BCA sehingga menjadikan BCA tidak harus membayar pajak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Pajak di Indonesia masih mengalami kendala, hal tersebut menyebabkan efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari 2013 hingga 2016 dan kenaikan di tahun 2017 yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 dibawah ini. Pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan namun kenaikan itu bukan apa-apa karena penerimaan pajak pada tahun tersebut tidak sepadan dengan target penerimaan pajak 2017.

Tabel 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

presentase realisasi penerimaan pajak dalam triliun rupiah					
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.027,37	1.294,26	1.355,20	1.283,60
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.147,50
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	89,40%
Sumber: kemenkeu.go.id/apbnkita					

Berdasarkan Tabel 1.1 (*source: kemenkeu.go.id/apbnkita*) dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian ini terdapat teori yang mendukung analisis dari penelitian ini yaitu teori agensi dan teori legitimasi. Menurut Jensen and Meckling (1976), Teori keagenan atau yang lebih dikenal dengan *Agency Theory* adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agen*) untuk melakukan sejumlah jasa dan pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan. Adanya pemisahan fungsi antara pemilik dengan manajemen sebagai pengelola perusahaan dapat menimbulkan konflik. Yang disebut dengan *agency problem* atau masalah. Hubungan suatu teori keagenan dengan penelitian *tax avoidance* ini dikarenakan adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Jika tidak ada pengelolaan yang baik akan terjadinya suatu konflik, dimana konflik kepentingan yang terjadi ini diawali oleh adanya asimetri informasi dan *moral hazard*.

Memanfaatkan peraturan yang berlaku, aktivitas perencanaan pajak bertujuan untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Jika dilihat dari perspektif *agency theory*, bahwa keputusan penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh manajer sehingga penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan (Desai and Dharmapala, 2009). Beberapa investor tidak menyetujui praktik penghindaran pajak ini karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penghindaran pajak dan biaya tidak langsung yang mungkin lebih besar dari manfaat dalam

melakukan praktik penghindaran pajak. Karena itu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus mempertimbangkan cost dan benefit.

Teori legitimasi sendiri telah menerangkan bahwa masyarakat dapat melakukan de-legitimasi terhadap perusahaan yang memiliki perilaku tidak sesuai dengan norma yang berlaku sewajarnya. Ketika perusahaan telah melakukan tindakan yang kurang etis dan melanggar norma, perusahaan akan berusaha menjaga citranya dan menjaga legitimasi dari masyarakat dengan media berupa *corporate social responsibility* (CSR). Perusahaan yang melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih banyak dianggap sangat peduli terhadap sekitar dan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri dalam mencari suatu keuntungan. Dengan mengungkapkan CSR lebih banyak, internal perusahaan berusaha agar masyarakat tetap mendukung kegiatan usahanya meskipun perusahaan tersebut sebenarnya telah melakukan tindakan yang kurang sesuai dengan norma masyarakat. Jika masyarakat mengetahui apakah perusahaan melakukan agresivitas pajak atau tidak, dengan mengungkapkan CSR yang banyak, pihak internal perusahaan berharap perhatian masyarakat akan teralihkan dari tindakan yang tidak sesuai norma. Dengan demikian, legitimasi perusahaan tersebut tetap terjaga.

Penelitian terdahulu yang terkait *Tax Avoidance* terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda-beda (berpengaruh dan tidak berpengaruh). Menurut Desai and Dharmapala (2009), apabila dilihat dari perspektif *agency theory*, bahwa keputusan penghindaran pajak perusahaan menjadi peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan

penghindaran pajak yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, Elly dan Natalia (2017) juga mengatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hasil ini mendukung suatu teori keagenan. Disisi lain bisa saja penghindaran pajak secara legal ini menjadi pengaruh yang positif pada kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam teori legitimasi akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih banyak di berbagai bidang (Deegan et al., 2002). Organisasi yang merencanakan pajaknya secara agresif justru lebih sedikit dalam memberikan pengungkapan CSR (Zeng, 2012). Hal tersebut berlawanan dengan hasil temuan Lanis and Richardson (2013) yang mengidentifikasi bahwa tindakan agresivitas pajak perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Mengingat pentingnya strategi penghindaran pajak agar tidak keluar dari undang-undang atau peraturan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak perusahaan terhadap kinerja perusahaan (kinerja keuangan & kinerja non keuangan) pada sektor perbankan.

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan?
2. Apakah *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja non Keuangan?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris dari pengaruh *tax avoidance* terhadap Kinerja Keuangan?
2. Untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris dari pengaruh *tax avoidance* terhadap Kinerja non Keuangan?

1.4 **Manfaat Penelitian**

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan wawasan terhadap perkembangan perpajakan khususnya pada topik *tax avoidance*, dan penelitian ini dapat juga digunakan sebagai referensi dan pendukung pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* dan kinerja perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan untuk lebih termotivasi menyajikan laporan yang andal dan tidak menyimpang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai praktik-praktik penghindaran pajak suatu perusahaan dan pemerintah juga dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak tersebut dan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya sehingga realisasi setiap tahun tercapai.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan suatu penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi ulasan tentang adanya penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan suatu penelitian, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan, batasan penelitian, variable penelitian, definisi operasional serta cara pengukuran variable, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir tentang teknik analisis data penelitian yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data yang menggunakan deskriptif dan SEM-PLS serta pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis, kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya, yang diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dari penelitian ini.

